

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Setelah peneliti melakukan analisis dan pembahasan mengenai Peran Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi NTT dalam Pengiriman dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Ke Luar Negeri, Maka terdapat tiga bagian yang peneliti simpulkan yakni:

- 1) BP3MI NTT memiliki peran penting dalam memastikan proses pengiriman dan penempatan pekerja migrant Indonesia yang aman dan legal di wilayah Nusa Tenggara Timur. Mereka melakukan pemantauan terhadap agen-agen penyalur tenaga kerja, memberikan informasi dan pelatihan kepada calon pekerja migrant, serta memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada pekerja migrant Indonesia yang mengalami masalah di luar negeri. Selain itu, BP3MI NTT juga bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, imigrasi, kemenkes dan lembaga-lembaga perlindungan migrant di negara tujuan, untuk meningkatkan koordinasi dalam melindungi hak dan kepentingan pekerja migrant Indonesia. Dengan melakukan fungsi-fungsi ini, BP3MI NTT berusaha meminimalkan risiko eksploitasi, penyalahgunaan, dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap pekerja migrant Indonesia. Dan juga BP3MI NTT melakukan sosialisasi tentang hak-hak pekerja migrant, termasuk prosedur legal dan keselamatan kerja di negara tujuan. Mereka juga menyediakan layanan konseling dan bantuan bagi pekerja migrant dan keluarganya. Dengan upaya-upaya ini, BP3MI NTT berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terjamin bagi pekerja migrant Indonesia yang bekerja di luar negeri.
- 2) BP3MI NTT memiliki faktor penghambat lainnya adalah adanya resiko eksploitasi dan penyalahgunaan yang di hadapi oleh pekerja migrant Indonesia di negara tujuan. Hal ini dapat mencakup pemutusan kontrak

secara sepihak, pelecehan, atau kondisi kerja yang tidak manusiawi. Kurangnya akses terhadap layanan kesehatan dan perlindungan sosial juga menjadi masalah serius bagi pekerja migrant. Sementara itu, faktor pendukung dalam pengiriman dan penempatan pekerja migrant Indonesia meliputi adanya program-program pemerintah yang mendukung migrasi yang teratur dan aman, seperti pelatihan keterampilan dan pemberian informasi yang akurat kepada calon pekerja migrant. Selain itu, kerja sama antara pemerintah, imigrasi, disnaker, dan negara tujuan dalam menyediakan jaminan perlindungan bagi pekerja migrant juga dapat menjadi faktor pendukung yang signifikan.

- 3) BP3MI NTT memiliki peran penting dalam melindungi hak pekerja migrant Indonesia selama berbagai tahapan, termasuk masa pra penempatan, penempatan, dan purna penempatan, jadi BP3MI NTT juga aktif dalam memberikan edukasi kepada pekerja migrant Indonesia tentang hak-hak mereka, baik sebelum berangkat maupun setelah kembali ke tanah air. Ini mencakup informasi tentang upah minimum, jam kerja, hak medis, dan perlindungan lainnya yang dijamin oleh hukum di negara tujuan. Selama masa penempatan, BP3MI NTT juga melakukan pemantauan terhadap kondisi kerja pekerja migrant Indonesia di luar negeri melalui kerjasama dengan agen penyalur tenaga kerja dan lembaga perlindungan migrant di negara tujuan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka bekerja dalam lingkungan yang aman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu BP3MI NTT juga memiliki mekanisme untuk menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang diajukan oleh pekerja migrant Indonesia terkait pelanggaran hak mereka di negara tujuan. Mereka memberikan bantuan hukum dan dukungan psikologis kepada pekerja migrant yang mengalami masalah, serta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menyelesaikan masalah kasus tersebut.

## 6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mempunyai saran sebagai berikut:

- 1) BP3MI NTT sebaiknya perlu lebih memperluas kerja sama dengan pemerintah yang ada di Provinsi NTT, terutama bagi pihak yang memiliki wewenang untuk membantu memberikan pelayanan ataupun perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia. Jalinan kerja sama dapat dibentuk dengan membuat kesepakatan dan ditandatangani oleh pihak-pihak terkait (pemerintah pusat, daerah, desa, stakeholder, ataupun dinas terkait). Lalu untuk memastikan kesepakatan dapat berjalan baik yaitu dengan membuat peraturan sanksi untuk pihak yang tidak mengindahkan kesepakatan. Sanksi yang diberikan bisa berupa denda (nominal sesuai kesepakatan) dan hasil denda yang diperoleh dimasukkan ke kas anggaran untuk menambah biaya support dalam penanganan PMI Yang bermasalah di negara penempatan
- 2) PMI, CPMI, ataupun masyarakat yang berminat bekerja ke luar negeri sebaiknya perlu mencari informasi lebih mendalam dari sumber yang terpercaya sebelum mengambil keputusan, serta tidak boleh langsung tergiur oleh tawaran menarik tanpa mencari tahu terlebih dahulu tentang kebenarannya. Terlebih lagi sumber informasi sudah cukup mudah untuk diakses, salah satunya bisa didapat melalui media sosial lembaga terkait. Sebab ketika mengambil keputusan yang tidak tepat karena tergiur proses cepat, maka akan menjadi akar permasalahan dialami saat berada di luar negeri.